

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teoritis

#### 1. Persepsi

Manusia merupakan makhluk sosial dan sekaligus makhluk yang individual, sebagai makhluk individu yang berarti mempunyai kehendak, cita-cita kepribadian sendiri yang berbeda antarmanusia, manusia adalah makhluk yang sempurna yang diberi akal, maka dengan akal manusia dapat menjalani kehidupan yang diperolehnya melalui pengetahuan dan proses berfikir yang diperolehnya melalui jalur pendidikan yaitu pendidikan informal, formal maupun nonformal. Dan manusia sebagai makhluk sosial yang akan selalu memerlukan suatu interaksi dan berhubungan dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia.

Dalam melakukan interaksi itu manusia sering melakukan persepsi, adapun pengertian persepsi secara umum adalah “pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek. Proses pencarian informasi untuk dipahami, alat-alat untuk memperoleh informasi melalui penginderaan, penglihatan, peraba dan seterusnya) dan alat untuk memahami adalah kesadaran”, Linda L. Davidoff dalam Mari Juniati (1988:232).

Persepsi dapat diartikan sebagai kesan-kesan dan penafsiran seseorang terhadap objek tertentu. Sedangkan dilihat keseluruhan persepsi

merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain, yang di dalam prosesnya dilalui dengan adanya pandangan yang berasal dari komponen pengetahuan sehingga akan mempunyai gambaran yang dapat dinyatakan perilaku terhadap objek tertentu.

Irwanto (1996:71) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai disadari dan dimengerti”. “Persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya”, Moskowitz dan Orgel dalam Bimo Walgito (2004:88). Pendapat lain yang diungkapkan oleh Harold J. Leavitt dalam Muslichah Zarkasi (1992:107) “persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu”.

Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito (2004:89)

Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka akan mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi itu bersifat individual.

Hubungan antara stimulus dengan respon itu bersifat mekanis, stimulus atau lingkungan akan sangat berperan dalam menentukan respon atau perilaku organisme (individu), respon yang diberikan oleh individu

terhadap stimulus yang ada persesuaian perhatian individu, suatu yang dipersepsi individu tergantung pada stimulus dan keadaan individu yang bersangkutan. Stimulus yang diberikan mendapat pemeliharaan dari individu tergantung kepada berbagai faktor, diantaranya adalah perhatian individu yang merupakan aspek psikologis dalam mengadakan persepsi, Wainer dalam Bimo Walgito (2004:92).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka persepsi adalah tanggapan atau kesan seseorang terhadap suatu objek, yang dipengaruhi pengindraannya, lingkungan, kebiasaan dan kebutuhan, sehingga dapat memberikan makna sebagai hasil dari pengamatan dan persepsi seseorang akan berbeda dengan yang lain.

### **1.1 Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi**

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

#### **1. Objek yang dipersepsi**

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung

mengenai syaraf penerima yang bekerja secara reseptor. Namun, sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

## 2. Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motorik.

## 3. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Beberapa hal-hal tersebut dikemukakan bahwa untuk mengadakan persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yaitu merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu (1) Objek atau stimulus yang dipersepsi; (2) Alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan syarat fisiologis; dan (3) Perhatian, yang merupakan syarat psikologis (Bimo Walgito, 2004:89-90).

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan dalam Munir (2010:1-2) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian  
Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada disekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Set  
Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.
3. Kebutuhan  
Kebutuhan sesaat maupun pada seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
4. Sistem nilai  
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh bila pada persepsi seseorang.
5. Ciri kepribadian  
Misalnya A dan B bekerja di suatu kantor. A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B seorang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.
6. Gangguan jiwa  
Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, persepsi seseorang sangat menentukan perilaku baik persepsi negatif terhadap objek yang dapat mengakibatkan motivasi yang salah atau kurang tepat bagi seseorang, sebaliknya persepsi yang positif terhadap suatu objek dapat mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang.

## 2. Masyarakat

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk *monodualis*, artinya di samping sebagai makhluk pribadi manusia juga merupakan makhluk sosial sebagai makhluk sosial seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles, 384-322 SM dalam Budiyanto (2004:3), "Manusia adalah *zoon politicon* atau

mahluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya”. Sebagai mahluk sosial, sesungguhnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Manusia dengan aktivitasnya, telah membentuk kelompok-kelompok di dalam suatu wilayah tertentu yang dapat disebut dengan masyarakat.

Pengertian masyarakat diungkapkan oleh Robert Mac Iver dalam Budiyanto (2004:95) bahwa “masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertib/teratur (*society means a system of orderer relations*)”. Diantara hubungan-hubungan yang dilakukan antarmanusia terdapat suatu hubungan yang sangat mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Hubungan tersebut adalah hubungan politik. Sedangkan Koentjaraningrat dalam Budiyanto (2004:101) mengungkapkan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tetentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Harold J. Laski dalam Budiyanto (2004:101) “masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Dengan kata lain masyarakat dapat dikatakan mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah”. Menurut Soerjono Soekamto dalam Budiyanto (2004:101), sejak dilahirkan manusia memiliki dua keinginan pokok, yaitu :

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (yaitu masyarakat)
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Di dalam masyarakat, orang melakukan interaksi dengan orang lain, menjalankan aktivitas dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan karena manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu, maka ada hasrat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut agar manusia tersebut bisa menjadi bagian dari masyarakat dan lingkungannya.

Pendapat lain mengenai masyarakat juga diungkapkan oleh Paul B. Horton dan C. Hunt dalam Setiawan Dimas (2012:1), menurut mereka “masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut”. Selain itu pendapat mengenai pengertian/definisi tentang masyarakat dikemukakan oleh J.L. Gilin dan J.P. Gilin. Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Admin (2012:1) “Masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama”.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama yang melakukan interaksi agar bisa bekerja sama, tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang sama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama adalah

bagaimana cara mengatur kegiatan di dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan bersama.

Ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya sebagai berikut (Admin, 2012:1):

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

## **2.1 Faktor-Faktor/Unsur-Unsur Masyarakat**

Menurut Soerjono Soekanto dalam Dimaz Marham (2009:1) di dalam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini:

1. Beranggotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antaranggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Menilik kenyataan di lapangan, suatu kelompok masyarakat dapat berupa suatu suku bangsa. Bisa juga berlatar belakang suku. Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (masyarakat modern). Dalam lingkungan masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin.



Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, nampaknya berpangkal tolak dari kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan alam yang buas pada saat itu. Kaum pria melakukan pekerjaan yang berat seperti berburu, menangkap ikan di laut, menebang pohon, berladang dan beternak. Sedangkan kaum wanita melakukan pekerjaan yang ringan seperti mengurus rumah tangga, menyusui dan mengasuh anak-anak, merajut, membuat pakaian, dan bercocok tanam.

Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih dikenal dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan terbatas sampai pada cakupan nasional, regional maupun internasional. Dalam lingkungan masyarakat maju, dapat dibedakan sebagai kelompok masyarakat non industri dan masyarakat industri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor atau unsur-unsur masyarakat adalah manusia satu dengan yang lainnya menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat dan di dalamnya terdapat suatu aturan yang mengikat. Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (masyarakat modern).

Ada beberapa teori yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa manusia hidup bersama dalam bentuk masyarakat (Budyanto, 2004:102).

1. Teori Biologis
  - a. Mudah mencari makan
  - b. Mempertahankan diri
  - c. Berketurunan
2. Teori Imitasi
  - a. Mudah meniru orang lain
  - b. Mencontoh orang lain
3. Teori Organisme  
Manusia tidak berbeda dengan sel tubuh, sel yang satu tidak berarti apa-apa tanpa sel lain. Oleh karena itu manusia perlu bermasyarakat.

## **2.2 Masyarakat Politik**

Dasar organis pembentukan masyarakat adalah keinginan manusia untuk hidup bersama atau kerja sama, tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang sama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama adalah bagaimana cara mengatur kegiatan di dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan bersama.

Tujuan bersama menjadi salah satu hal yang mendasari kepentingan manusia untuk membentuk organisasi atau kelompok bersama. Suatu negara dibentuk dan dijalankan oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati. Untuk dapat melaksanakan segala aktivitas yang

berhubungan dengan tujuan negara tersebut diperlukan adanya kekuasaan. Sementara disadari bahwa walaupun memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak setiap warga negara memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana cara mewujudkan tujuan bersama. Untuk itulah politik ada, karena politik menjadi gelanggang bagi persaingan gagasan dan kepentingan warga negara.

Masyarakat di dalam gelanggang politik, berupaya untuk memperoleh kekuasaan melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang diarahkan untuk mewujudkan gagasan mereka. Mereka dapat melakukan penyebaran gagasan, mengerahkan dan menarik massa, mengkritik kebijakan, atau mengajukan rancangan sebuah peraturan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari banyak kegiatan yang dilakukan dalam suatu masyarakat politik. Karena itu dapat dikatakan bahwa masyarakat politik tidak hanya menyangkut tindakan, tetapi juga budaya politik yang menjadi latar belakang.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat politik adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan, pengendalian kekuasaan dan sebagainya.

Pada masyarakat politik, interaksi setiap individu maupun kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

### 1. Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik.

### 2. Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba dalam Budiyanto (2004:103), “budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu”. Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dalam simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

### 3. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kelompok atau organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung, meskipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasar pemilihan umum. Kelompok kepentingan bisa menghimpun ataupun mengeluarkan

dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik, dan biasanya mereka berada di luar tugas partai politik.

#### 4. kelompok penekan

Dalam pandangan Stuart Gerry Brown dalam Budiyanto (2004:103), “kelompok penekan merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah”.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik biasanya memilih tindakan-tindakan tertentu yang berbeda satu sama lain. Tindakan-tindakan tersebut biasanya sangat khas dan dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingannya. Secara umum, tindakan tersebut tercermin melalui perilaku politik yaitu tingkah laku aktor politik dan warga negara dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik.

Kepentingan setiap warga negara tidaklah sama, bisa jadi masing-masing membawa suara yang berbeda. Agar kepentingan seseorang atau suatu kelompok diketahui oleh pihak lain dan dijadikan sebagai pokok bahasan, maka diperlukan adanya komunikasi politik. Komunikasi politik adalah semua kegiatan dalam sistem politik yang dimaksudkan agar aspirasi dan kepentingan politik warga negara diakomodasi menjadi berbagai kebijakan.

Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat politik bukanlah masyarakat yang statis. Jika kehidupan politik yang demokratis dapat diterapkan, maka kehidupan masyarakat politik akan menjadi sangat dinamis. Sebab, kelompok-kelompok yang berbeda akan mencoba memperjuangkan berbagai kepentingannya melalui saluran komunikasi politik yang ada. Tentu saja semua harus dilakukan dalam rangka demokrasi secara damai dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tentang pengertian persepsi dan masyarakat, sekarang baru diketahui bahwa persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap suatu objek yang dipengaruhi pengindraannya, lingkungan, kebiasaan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan makna sebagai hasil dari pengamatan dan persepsi setiap individu terhadap suatu objek dapat berubah-ubah dan berbeda pada masing-masing individu, tergantung pada pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya.

### **3. Aspek Ekonomi**

Secara etimologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* artinya rumah tangga atau keluarga dan *nomos* yang artinya aturan atau manajemen. Jadi secara harfiah ekonomi adalah aturan atau manajemen rumah tangga. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), “ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)”.

Pengertian atau definisi mengenai ekonomi juga dipaparkan oleh beberapa ahli. Adam Smith dikenal sebagai filsuf berkebangsaan Skotlandia. Ia juga di bangsa-bangsa Barat disebut sebagai Bapak Ekonomi. Teori ekonominya, *Laissez Faire*, merupakan teori ekonomi pasar bebas yang banyak mempengaruhi pada abad ke-18. Menurut Adam Smith dalam Andika Prasetya (2012:1) “ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara”. Pendapat lain mengenai ekonomi juga dipaparkan oleh Abraham Maslow dalam Andika Prasetya (2012:1), menurutnya “ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien”.

Dalam bukunya bertajuk *Foundations Of Economic Analysis*, Paul A. Samuelson dalam Andika Prasetya (2012:1) mengemukakan bahwa “ekonomi adalah sebagai cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan golongannya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”. Selain itu, definisi mengenai ekonomi juga diungkapkan oleh M. Manulang dalam Andika Prasetya (2012:1), menurutnya “ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi pemenuhan barang maupun jasa”.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

#### **4. Aspek Hankam**

“Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”, dalam Rahasia Hidup (2010:1). Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan di beberapa negara (misalnya Jepang) disebut Angkatan Bela Diri.



Jenis pertahanan:

- a. Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer,
- b. Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter

“Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan”, dalam Rahasia Hidup (2010:1). Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.

Berdasarkan pengertian pertahanan dan keamanan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan keamanan negara adalah pertahanan keamanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri.

#### **4.1 Komponen Pertahanan Negara**

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat

ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa

1. Komponen utama

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

2. Komponen cadangan

Komponen cadangan (Komcad) adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

3. Komponen pendukung

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. Sumber daya nasional terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

a. Para militer

- 1) Polisi (Brimob)
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 3) Perlindungan masyarakat(Linmas) atau Hansip
- 4) Satuan pengamanan (Satpam)
- 5) Resimen Mahasiswa (Menwa)
- 6) Organisasi kepemudaan
- 7) Organisasi bela diri
- 8) Satuan tugas (Satgas) partai

b. Tenaga ahli/profesi

Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi.

c. Industri

Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman.

d. Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat

digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

e. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dan sebagainya).

## **5. Pemerintahan Orde Baru**

Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Dengan adanya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan di Indonesia, maka dimulailah babak baru yaitu sejarah Orde Baru.

Masa Orde Baru menurut I Wayan Badrika (2006:123) pada hakikatnya bahwa:

Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lampau. Di samping itu juga berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Ada pula yang berpendapat bahwa “Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia” (Ardhika Mulasari, 2012:1). Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada Era Pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dalam jangka waktu tersebut perkembangan ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun pada saat itu terjadi persamaan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Orde Baru adalah masa dimana bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soeharto yang berdalil menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen juga berkeinginan memulihkan kembali kedaulatan rakyat baik dibidang politik maupun ekonomi yang telah dihancurkan oleh Orde Lama.

### **5.1 Latar Belakang Lahirnya Orde Baru**

Lahirnya Era Orde Baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada

Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.

## **5.2 Peristiwa-Pristiwa Lahirnya Orde Baru**

### **1. Aksi-Aksi Mahasiswa**

Pada Sidang paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda-pemuda (KAPPI), dan pelajar (KAPI). Kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (Sarjana), KAWI (Wanita), dan KAGI (guru). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu Front Pancasila.

Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi:

1. Bubarkan PKI
  2. Pembersihan Kabinet DWIKORA
  3. Turunkan/Perbaiki harga barang
2. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan.

### 3. Kabinet Dwikora yang disempurnakan

Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istana negara mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI. Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negeri yang di pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.

### 4. Surat Perintah 11 Maret 1966

Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama "*kabinet 100 menteri*". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden Cakrabirawa melaporkan bahwa banyak "*pasukan liar*" atau "*pasukan tak dikenal*" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amir Machmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari,

terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

#### 5. Penyerahan Kekuasaan

Pada tanggal 20 Februari 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada Kamis pukul 19.30 bertempat di Istana Negara dengan disaksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI, Ir. Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto.

Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto



sebagai presiden tersebut, secara legal, formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto yang kemudian disebut Orde Baru pun mulai menjalankan pemerintahannya.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia, dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerja sama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Orde Baru lahir sebagai upaya untuk:

- a. mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.
- b. penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
- c. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

- d. menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Jenderal Soeharto sebagai pemimpin utama Orde Baru yang menjabat ketua presidium Kabinet Ampera, pada tanggal 19 April 1969 telah memberikan uraian mengenai hakekat Orde Baru yaitu sebagai berikut “Orde Baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dilihat dari proses lahirnya cita-cita mewujudkan Orde Baru itu merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktek-praktek penyelewengan yang telah terjadi pada waktu-waktu yang lampau yang disebut dengan Orde Lama. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Jadi oleh karena itu pengertian Orde Baru yang terpenting ialah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan iktikad baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat, mengabdikan kepada kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan sendi Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan-landasan Orde Baru antara lain:

1. Landasan idiil

Falsafah dan ideologi negara Pancasila

2. Landasan konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan-landasan yang dipakai sampai terbentuknya pemerintahan baru sesudah pemilihan umum. Sedangkan aspek positif Orde Baru yang harus diperkuat dan dikembangkan adalah:

- a. Aspek idiil

Orde Baru adalah satu tatanan seluruh perikehidupan kita, baik yang menjangkau kehidupan kita sebagai individu dalam masyarakat dengan negara maupun antar bangsa-bangsa yang dijiwai oleh falsafah Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Aspek mental psychologist

Orde Baru adalah paduan jiwa, semangat dan dinamika yang bersifat idealistis dan pragmatis religius. Idealistis dalam arti kita dengan penuh kesadaran dan keyakinan memegang teguh cita-cita nasional serta mampu memperjuangkannya sekuat tenaga. Realistis dalam arti bahwa dalam rangka mencapai tujuan, tiap-tiap kebijaksanaan, langkah dan tindakan selalu memperhitungkan situasi dan kondisi, ruang dan waktu untuk mencapai hasil optimal. Pragmatis dalam arti bahwa

setiap usaha dan kegiatan harus dapat memberikan manfaat dan kegunaannya bagi rakyat, bangsa dan negara yang sebesar-besarnya.

c. Aspek structural-prosedural

Orde Baru adalah satu tata susunan masyarakat dan negara yang stabil, dinamis dan demokratis, baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi dengan kepemimpinan berdasarkan kelembagaan yang kuat dan bijaksana yang menjamin gerak masyarakat yang tertib, teratur, maju dan tepat.

d. Aspek hukum

Orde Baru adalah satu tertib masyarakat dan negara berdasarkan hukum dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dan dimana warga negara maupun penguasa tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku.

e. Aspek dinamika

Orde Baru adalah dinamika gerak masyarakat yang cepat, teratur, terarah, terkoordinasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

3. Landasan Operasional (Budiyanto, 2004:110)

TAP MPRS/MPR

### 5.3 Masalah Ideologi Masa Orde Baru

Pancasila berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Pancasila dijadikan ideologi yang komprehensif

yang mengatur semua lini kehidupan masyarakat. Negara (Orde Baru) menjadi maha tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk masyarakat. Nilai-nilai itu selalu disematkan dibenak masyarakat melalui indoktrinasi, yaitu melalui penerapan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Yaitu "pemasyarakatan Pancasila" demi menjaga dan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Semua warga negara diajar untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi lain, perilaku penguasa Orde Baru pada waktu itu menunjukkan arah yang tidak seirama. Bahkan sebaliknya bertentangan dengan nilai dan semangat yang terkandung di dalam Pancasila.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kemurnian Pancasila dijaga dengan senjata sambil mengharamkan semua paham maupun tafsir di luar versi negara. Pancasila diperlakukan secara monopolistik sebagai ideologi yang komprehensif dan satu-satunya kebenaran. Pancasila pun dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Bahkan warga negara yang berusaha memberi tafsir berbeda akan dicap anti-Pancasila. Pancasila menjadi sesuatu yang amat ditakuti.

#### **5.4 Perkembangan Politik Masa Orde Baru**

1. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik

dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA (I Wayan Badrika, 2006:128) adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
  - b. Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
  - c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
  - d. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2. Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:
- a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).

- b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
  - c. Golongan karya (golkar)
3. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali, Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Masyarakat bebas memilih partai yang sukainya yang ikut dalam pemilu. Pada masa itu masyarakat hanyalah memilih partai. Anggota legislatif ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa (Soeharto) berdasarkan daftar yang diajukan oleh panitia yang ditunjuk oleh presiden. Pada masa itu, panitia yang bertugas mencari calon anggota legislatif ialah militer di setiap daerah. Daftar nama calon itu kemudian diserahkan kepada presiden.

Biasanya setiap masa pemilihan, presiden selalu menyeleksi anggota legislatif tersebut. Ketika itu Presiden Soeharto dalam menentukan anggota legislatif melihat semua golongan dan suku (meskipun tidak semua suku terwakili). Artinya anggota legislatif harus sudah mewakili semua golongan masyarakat. Misalnya golongan petani, buruh, cendekiawan, budayawan, dan lain sebagainya. Selain itu, Presiden Soeharto juga melihat suku. Anggota legislatif selalu diupayakan mewakili semua suku yang

ada di Indonesia, meskipun selalu didominasi oleh Suku Jawa dan militer.

Untuk pemilihan presiden dilakukan oleh anggota DPR dan MPR. Anggota DPR dan MPR yang telah terpilihlah yang kemudian akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR dan MPR yang awalnya dipilih oleh panitia (namun sekehendak presiden) merasa berutang budi kepada Presiden Soeharto. Hal tersebut menyebabkan anggota DPR dan MPR membalas budi dengan menetapkan Soeharto kembali menjadi Presiden. Sehingga selama Orde Baru presiden dijabat oleh Soeharto dan sistem pemilihan berlangsung seperti itu selama 32 tahun masa Orde Baru.

Pemilu pada masa Orde Baru dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini sering kali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Berikut adalah Pemilu-Pemilu yang diadakan pada masa Era Orde Baru:

a. 2 Mei 1977

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara



serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

b. 4 Mei 1982

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)

### 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

#### c. 23 April 1987

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

#### d. 9 Juni 1992

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

e. 29 Mei 1997

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Propinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002.

Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru. Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)

### 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

### 4. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.

Kebijakan lain yang diambil pemerintah Orde Baru adalah menetapkan peran ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI. ABRI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara tetapi juga berperan dibidang politik. Hal ini terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti walikota, bupati dan gubernur bahkan ABRI memiliki jatah dikeanggotaan MPR/DPR.

Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengemukakan bahwa “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bukan hanya pada bidang politik pemerintahan, ternyata kedudukan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat disektor ekonomi. Banyak anggota ABRI menjadi kepala sekepala BUMN maupun komisaris diberbagai perusahaan swasta.

#### **5.4.1 Dampak Positif dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orde Baru**

Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

#### **5.4.2 Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orde Baru**

Terbentuk pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.

- a. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
- b. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.
- c. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara

- sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Soeharto selalu terpilih.
- d. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
  - e. Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
  - f. Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.
  - g. Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabiskan uang rakyat.

### **5.5 Kehidupan Bidang Ekonomi Orde Baru**

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Jadi, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi,

penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:

#### 1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah menempuh cara:

- a. Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembangunan
- b. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakekat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Langkah-langkah yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti:
  - 1) rendahnya penerimaan negara
  - 2) tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara
  - 3) terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
  - 4) terlalu banyak tunggakan utang luar negeri
  - 5) penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
- b. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
- c. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

- 1) mengadakan operasi pajak
- 2) cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang
- 3) penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara
- 4) membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Program stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun inflasi berhasil dibendung



(pada tahun 1967-awal 1968). Sesudah kabinet pembangunan dibentuk pada bulan Juli 1968 berdasarkan Tap MPRS NO.XLI/MPRS/1968, kebijakan ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valas. Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai, sebab sejak 1966 kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat diatasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.

Keadaan ekonomi Indonesia paska Orde Lama sangat parah, utangnya mencapai 2,3-2,7 miliar, sehingga pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo, Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979

- 2) Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1969-1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.

Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran utangnya.

## 2. Pembangunan Nasional

Dilakukan pembangunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:

- a) Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
- b) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (pelita/pembangunan lima tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan

jangka panjang, sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.

Selama periode Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu:

#### 1. Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan ORBA.

Tujuan Pelita I:

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I:

Pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I:

Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa malari (malapetaka lima belas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia.

Terjadilah pengrusakkan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

## 2. Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5%.

## 3. Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

- a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
- c. Pemerataan pembagian pendapatan
- d. Pemerataan kesempatan kerja
- e. Pemerataan kesempatan berusaha

- f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
- g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
- h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

#### 4. Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

#### 5. Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% pertahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

#### 6. Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang

berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

a. Industri

Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan industri ditujukan untuk memperkokoh struktur ekonomi nasional dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antarsektor, meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.

b. Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sehingga semakin mampu meningkatkan dan

menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah.

c. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan SDM diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan produktif.

d. Perdagangan

Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dan memperluas pasar serta membentuk harga yang wajar, dan memperkuat kesatuan ekonomi nasional dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan devisa negara.

e. Transportasi

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang

handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

f. Pertambangan

Pembangunan pertambangan diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan SDA tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, bagi keperluan energi, dan bagi keperluan masyarakat, serta untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha.

g. Kehutanan

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dan dengan mengutamakan pelestarian SDA dan fungsi lingkungan



hidup, memelihara tata air, serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama pemerintah daerah setempat.

h. Usaha Nasional

Pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha negara, dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan usaha nasional terus didorong perluasan kerja sama dan keterkaitan usaha antarsektor dan antarsubsektor, antara usaha skala besar, menengah, dan kecil, berdasarkan kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Usaha nasional terus dibina dan dikembangkan agar makin berperan dalam mendorong perkembangan pasar

dalam negeri dan meningkatkan daya beli rakyat serta semakin mampu bersaing untuk melakukan terobosan pasar internasional sehingga semakin mampu menghadapi arus globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia. Kerja sama usaha terutama dalam kegiatan investasi, perdagangan, dan pariwisata di lingkungan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik terus ditingkatkan secara menguntungkan dan diabdikan kepada kepentingan nasional.

i. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan Negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional.

j. Pos dan Telekomunikasi

Pembangunan pos dan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional dengan semakin memperlancar arus surat, barang, dan informasi serta semakin memperluas jangkauan jasa keseluruh pelosok tanah air dan ke luar negeri, serta ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi, dan keandalannya dalam pemberian jasa

komunikasi, informasi, pos, dan giro kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

k. Koperasi

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang semakin mandiri dan andal harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan ekonomi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sokoguru perekonomian nasional yang tangguh. Koperasi di pedesaan perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya, dan perlu semakin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan.

l. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan antardaerah, antara desa dan kota, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang

lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab daerah, khususnya daerah otonom.

m. Kelautan

Pembangunan kelautan diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional, termasuk ZEE, serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Pembangunan wilayah laut nasional juga dilaksanakan untuk mendukung penegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional serta perwujudan Wawasan Nusantara.

n. Kedirgantaraan

Pembangunan kedirgantaraan yang merupakan matra dan wahana kehidupan berupa wilayah dirgantara nasional yang merupakan wilayah yurisdiksi nasional dan terdiri atas udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa diarahkan pada penegakkan kedaulatan dan pendayagunaan keunggulan komparatif wilayah dirgantara. Pembangunan kedirgantaraan ditujukan pada perjuangan memperoleh pengakuan

internasional atas hak penggunaan wilayah dirgantara nasional dan penguasaan iptek untuk menghasilkan produk dan jasa kedirgantaraan.

o. Keuangan

Pembangunan keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal, efisien, dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat, serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan melalui upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran dilaksanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang semakin meluas dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Kebijakan keuangan harus mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang serasi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antardaerah yang mantap dan dinamis.

p. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi diarahkan pada pembangunan daerah, penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang serta peningkatan mutu kehidupan penduduk yang berpindah dan menetap di wilayah transmigrasi. Persebaran penduduk yang serasi dan seimbang juga dimaksudkan agar tersedia tenaga kerja yang diperlukan di daerah jarang penduduk, dan berfungsi sebagai unsur yang memperkuat pertahanan keamanan rakyat semesta di daerah bersangkutan. Pembangunan transmigrasi bertujuan pemeratakan pembangunan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang pada rencana tata ruang daerah dan wilayah serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

q. Energi

Pembangunan energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya. Pembangunan energi harus memperhatikan kelestarian sumber energi untuk jangka panjang, kebutuhan energi dalam negeri, peluang ekspor, keamanan dan keselamatan masyarakat, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan energi dilaksanakan melalui survai, eksplorasi, eksploitasi, dan

pemanfaatan sumber energi baru serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penambangan dan pengolahan sumber energi. Untuk menjaga kelestarian sumber energi perlu diupayakan pemanfaatan secara hemat, penganekaragaman dan penggunaan berbagai sumber energi secara optimal, dan penggunaan peralatan dan teknologi hemat energi dalam kerangka kebijaksanaan energi nasional yang menyeluruh dan terpadu.

r. Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan SDA secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

### **5.5.1 Dampak Positif dari Kebijakan Ekonomi Orde Baru**

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.

- b. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
- c. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
- d. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

### **5.5.2 Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru**

- a. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
- c. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial).
- d. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
- e. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
- f. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.



- g. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
- h. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

### **5.6 Kehidupan Bidang Hankam Orde Baru**

Di Era Orde baru, Hankamrata adalah doktrin militer yang berarti pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini adalah doktrin paling fundamental yang dijalankan militer demi pertahanan dan keamanan negara pada saat itu. Prinsip dari Hankamrata adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik sipil maupun militer, untuk terlibat aktif menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Seiring kejatuhan Presiden Soeharto dan euforia reformasi, istilah inipun hilang dari memori kolektif masyarakat. Pada masa ini muncul Penembak misterius atau sering disingkat Petrus (operasi clurit) adalah suatu operasi rahasia pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak

pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus", penembak misterius

1. Rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat

Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang mencakup keseluruhan daya mampu bangsa dan negara disusun, disiapkan, dan dikerahkan secara terpadu dan terkendali, serta didasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak kenal menyerah dan yang dijiwai keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut dilaksanakan dengan menanamkan sedini mungkin Pendidikan Pendahuluan Bela Negara serta pembinaan pendidikan dan pelatihan keprajuritan. Komponen kekuatan pertahanan keamanan negara perlu lebih ditata secara bertahap dan selektif terutama komponen dasar dan komponen khusus.

Pembangunan rakyat terlatih ditujukan pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara, dan pada penataan dan pengaturan serta perwujudannya agar fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dapat lebih terjamin pelaksanaannya dalam rangka lebih menanamkan semangat perlawanan rakyat semesta sebagai pendukung dan pengganda kekuatan ABRI. Pengaturan dan perwujudan rakyat terlatih akan meningkatkan disiplin nasional dalam meningkatkan kesadaran bela negara.

Pembangunan perlindungan masyarakat ditujukan pada terwujudnya kemampuan masyarakat dan ketahanan serta kemampuan lingkungan untuk secara swadaya aktif menanggulangi dan/atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.

## 2. ABRI

Pembangunan ABRI ditujukan pada peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan dan kemantapan keamanan dalam rangka perwujudan daya tangkal pertahanan keamanan negara secara terpadu yang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan bangsa dan negara. Daya tangkal pertahanan dan keamanan negara diwujudkan dalam bentuk pemantapan ketahanan wilayah nasional serta pemantapan seluruh kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara dengan dilandasi kesadaran, kerelaan dan tekad rakyat untuk bela negara serta kemandirian ABRI-rakyat.

Pembangunan ABRI ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatannya dalam menjamin tetap tegaknya kedaulatan di darat, laut, udara, dan dirgantara serta menjamin tegaknya hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui keterpaduan upaya dalam rangka memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. TNI-AD dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan wilayah dengan polapertahanan

wilayah negara yang strategis atas dasar perlawanan rakyat semesta; TNI-AL dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan laut untuk menjamin penegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional; TNI-AU dibangun untuk menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan negara diseluruh wilayah kedaulatan udara untuk menjamin yurisdiksi nasional; serta Polri dibangun untuk menjadi inti kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum untuk menjamin terwujudnya tertib hukum dan ketenteraman masyarakat.

ABRI sebagai inti kekuatan pertahanan keamanan negara, pembangunannya diarahkan kepada ABRI dengan kekuatan yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan kualitas dan mobilitas tinggi serta mampu dalam waktu relatif singkat diproyeksikan ke segala penjuru tanah air dan dalam keadaan darurat dapat cepat dikembangkan kemampuan dan kekuatannya.

ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam melaksanakan fungsi sosial politik, ABRI harus mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan unsur pemersatu kehidupan nasional, berperan serta secara aktif dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum dalam rangka memperkuat pertahanan nasional. Peran ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan

negara dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta perlu lebih dikembangkan dengan penerapan pembinaan teritorial yang diselenggarakan secara terpadu dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara perlu mengembangkan kerja sama keamanan secara bilateral dengan angkatan bersenjata negara tetangga atas dasar saling menghormati kedaulatan wilayah negara masing-masing, disamping terus meningkatkan kerja sama dalam upaya meningkatkan keprofesionalannya.

Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan Polri terus dikembangkan dengan mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat terus dibina dan ditingkatkan secara terpadu untuk menumbuhkembangkan sikap mental dan meningkatkan kepekaan serta daya tanggap masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dalam suatu sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa.

Modernisasi ABRI dilanjutkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan personel, perangkat lunak, dan perangkat keras, yang disesuaikan dengan kemajuan IPTEK serta sejauh mungkin

memanfaatkan kemampuan dan potensi yang terdapat serta dihasilkan di dalam negeri.

Pembangunan kekuatan cadangan TNI terus dilanjutkan dan ditujukan kepada terbinanya seluruh potensi dan kekuatan yang ada dalam masyarakat, baik tenaga manusia, peralatan, fasilitas maupun jasa, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan untuk memperbesar kekuatan dan meningkatkan kemampuan ABRI dalam rangka kepentingan pertahanan keamanan negara.

Penyelenggaraan bakti ABRI dalam wujud antara lain ABRI Masuk Desa, yang merupakan pengabdian ABRI dalam menyumbangkan kemampuannya, terus ditingkatkan untuk ikut menunjang pembangunan nasional dan mendorong pembangunan daerah dalam rangka memelihara kemandirian ABRI-rakyat.

### 3. Pendukung

Pembangunan komponen pendukung ditujukan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan serta keterpaduan upaya pertahanan keamanan negara serta pada penciptaan kondisi setiap saat diperlukan untuk dapat didayagunakan secara optimal terutama dalam menanggulangi berbagai tingkat keadaan darurat. Pembangunan dan pendayagunaan komponen pendukung pertahanan keamanan negara perlu ditata dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap investasi dalam pembangunan komponen pendukung pertahanan keamanan negara harus mewujudkan kemanfaatan yang nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempunyai waktu kegunaan yang cukup panjang, serta dapat mungkin disertai adanya kegunaan tambahan. Perlu dipersiapkan kemampuan komponen pendukung pertahanan keamanan negara untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dalam berbagai tingkat keadaan darurat.

Industri pertahanan keamanan dan industri strategis lainnya sebagai salah satu unsur komponen pendukung pertahanan keamanan negara perlu terus dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kebutuhan alat utama ABRI berdasarkan tuntutan lingkungan tugas serta prinsip prioritas ekonomi.

Wilayah negara sebagai salah satu unsur komponen pendukung pertahanan keamanan negara perlu dipersiapkan melalui penyiapan rencana tata ruang pada semua tingkatan agar dapat berperan sebagai wahana penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan agar dapat tercipta keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional. Perlu

dilakukan inveterisasi potensi cadangan sumber daya setrategis dan pemantapan garis batas wilayah nasional dalam rangka penyusunan rencana setrategis pertahanan keamanan negara.

### **5.7 Kehidupan Bidang Agama Orde Baru**

Di zaman Orde Baru, pemerintahan Soeharto melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui. Untuk menghindari permasalahan politis (dituduh sebagai atheis dan komunis), pemeluk kepercayaan tadi kemudian diharuskan untuk memeluk salah satu agama yang diakui, mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen atau Buddha. Klenteng yang merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengubah nama dan menaungkan diri menjadi wihara yang merupakan tempat ibadah agama Buddha.

### **5.8 Kehidupan Bidang Sosial Budaya Era Orde Baru**

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun-tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka



pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah semakin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahun 1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari

seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktu-waktu yang akan datang.

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya, antar golongan dan sebagainya) yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila. Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa). Dengan Pancasila akan dapat memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indonesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan penghayatan terhadap Pancasila oleh manusia Indonesia akan terasa dan terwujudlah Pancasila dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap orang Indonesia. Untuk melaksanakan semua ini dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal, maupun non-formal sehingga di tradisikan sebagai gerakan Budaya.

### **5.9 Penyimpangan Konstitusi pada Orde Baru**

Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut:

- a. MPR tidak berkehendak merubah Undang-Undang Dasar 1945
- b. Mengeluarkan Tap MPR tentang referendum belum sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945
- c. KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN
- d. Menerapkan sistem parlementer

Arah penataan kembali itu terkandung dalam tekad Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan dalil melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, Soeharto memanipulasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan absolutisme kekuasaan eksekutif. Tentang pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam dua pasal. Pasal 6 (2) mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan pasal 7 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih untuk waktu lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Dengan dua pasal tersebut Soeharto memanipulasi dalam rangka rekayasa untuk menciptakan absolutisme dengan tujuan agar selalu bisa terpilih kembali oleh MPR menjadi presiden.

Pada pasal 1 (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR”. Maka, kalimat di dalam pasal tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh Soeharto dan rezim orde barunya untuk menyatakan bahwa segala perasaan dan pikiran rakyat harus disalurkan lewat MPR dan rakyat tidak memiliki hak untuk

menyampaikan pikiran-pikirannya lagi, selain pikiran-pikiran yang berkembang di MPR. Oleh sebab itu demonstrasi dilarang, selalu dilarang dan dibubarkan dengan cara kekerasan dan penangkapan oleh polisi atau militer.

Dalam pasal 2 (1) menyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah utusan dari daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh UU. Dan dipasal 5 (1) disebutkan bahwa, presiden memegang kekuasaan membuat UU dengan persetujuan DPR. Jadi disini kekuasaan DPR hanya sebatas memberi persetujuan UU yang telah dibuat oleh presiden. Oleh sebab itu mudah bagi presiden untuk membuat UU susunan dan kedudukan MPR sesuai dengan selera presiden. Sehingga banyak wakil-wakil rakyat (MPR) ditambah dan diganti dengan wajah baru dimana fraksi Golkar adalah yang terbesar, ABRI diwakili di DPR, utusan daerah dan utusan golongan sebagai anggota MPR serta diadakannya penyederhanaan kepartaian menjadi dua parpol dan satu golongan. Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri-dari wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan dan kekaryaan dengan cara pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai dari tahun 1970 dengan

mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik. Hasilnya lahirlah tiga kelompok di DPR yaitu :

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari partai PNI, Parkido, Katolik, IPKI, serta Murba.
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.

Dimana pikiran-pikiran itu melahirkan konsensus nasional sistim Orde Baru, dimana intinya mau menempatkan kedudukan presiden di atas DPR/MPR. Dengan menundukkan DPR/MPR, sistim presidensil benar-benar ditegakkan. Bahkan dengan memanipulasi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Soeharto berhasil pula menempatkan dirinya menjadi mandataris MPR. Sebagai presiden dan mandataris MPR, Soeharto mendapat mandat atau kewenangan, selain menundukkan MPR, juga untuk menggantikan segala tugas dan fungsi MPR.

Formulasi politik itu merupakan bagian dari konsensus nasional diantara parpol yang ada, lalu dituangkan ke dalam paket UU politik 1969, khususnya UU parpol, UU pemilu dan UU susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD. Dalam praktek Orde Baru, semua nama yang ada di dalam daftar calon anggota DPR dan MPR ada ditangan

presiden. Sebelum itu para calon dilitsus (penelitian khusus) sebelum disahkan menjadi calon sementara dan calon tetap.

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pada zaman Orde Baru direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (Pelita). Pembangunan nasional yang selalu dikumandangkan tidak terlepas dari trilogi pembangunan sebagai berikut:

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa dengan ideologi Pancasila atau dengan dalil menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, Presiden Soeharto memanipulasi pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan tersebut tentu tidak terlepas dari kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sehingga dengan hal tersebut Soeharto membuat keabsolutan di pemerintahan. Dengan kekuasaannya Presiden Soeharto menentukan kebijakan bagaimana cara pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan MPR dan DPR,

rakyat tidak boleh berpendapat (tidak ada kebebasan pers), dan penyederhanaan terhadap partai politik.

### **5.10 Warisan Dari Orde Baru**

Setelah berjalan 32 tahun, Era Orde Baru segera digantikan dengan era yang populer disebut Reformasi. Era Reformasi ditandai dengan keberhasilan kelompok reformator yang melibatkan di dalamnya ribuan mahasiswa dan masyarakat “menumbangkan” rezim Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998, tatkala Soeharto melepaskan jabatannya sebagai presiden, detik itu pula Era Reformasi secara lebih serius dimulai. Lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, dan hadirnya BJ Habibie sebagai presiden baru, bagaimanapun merupakan fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri dari sejarah reformasi nasional, meskipun baru pada tahapan yang amat dini.

Hanya saja yang perlu dicatat, hadirnya Era Reformasi tidak berarti lantas seluruh adat kebiasaan Orde Baru luruh seratus persen. Bau Orde Baru, nyaris masih amat menyengat. Tabiat-tabiati yang sudah dibangun sekian lama masih sukar untuk dihilangkan begitu saja. Era Reformasi, dengan demikian bukanlah sebuah era yang lepas sama sekali dari unsur-unsur warisan Orde Baru. Bukan hanya wajah-wajah lama yang masih dominan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, tapi yang masih kental kelihatan ialah mentalitas Orde Baru yang sukar dihilangkan.

Dalam konteks ini, Orde Baru mewariskan beberapa pekerjaan rumah yang tidak begitu mengesankan. Warisan yang ditinggalkan Orde Baru, bila kita lihat, nyaris tak jauh berbeda dengan apa yang ditinggalkan rezim Orde Lama, diantaranya krisis ekonomi, politik, mentalitas dan hukum yang amat mencemaskan. Ditambah lagi dengan ambruknya tatanan sosial, timbulnya permusuhan antarkelompok dalam masyarakat. Di bawah ini, warisan Orde Baru Itu, akan diuraikan satu persatu.

1. Krisis ekonomi yang mencemaskan. Setahun sebelum Soeharto jauh (bulan Mei 1997) kondisi perekonomian nasional masih stabil. Tidak pernah terbesit sama bahwa, krisis ekonomi yang parah akan terjadi beberapa bulan kemudian. Krisis moneter baru dirasakan pada bulan Juli 1997. Krisis ini semakin parah, sehingga terpaksa Presiden Soeharto menghadirkan IMF. IMF mau membantu dengan memberikan bantuan terutama berupa financial. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi, butir-butir reformasi ekonomi versi IMF harus dilakukan pemerintah. Sampai disini tampak Indonesia sebagaimana disimbolisasikan oleh angkuhnya Micheal Camdessus yang bersedekap menyaksikan Presiden Soeharto membungkuk menandatangani *letter of intent*, yakni butir-butir reformasi versi IMF, berbeda dalam 'kendali' IMF. Belum ada formula ampuh mengakhiri krisis ekonomi. Salah satu akibatnya, dunia investasi Indonesia semakin terpuruk.



2. Virus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang tumbuh membudaya. Konon, Orde Baru memberi harapan bagi terciptanya Orde yang bersih dan demokratis. Namun, sejak awal 'budaya' korupsi menggejala dan semakin membesar terutama di tubuh lembaga birokrasi. Tahun 1970-an, mahasiswa gencar melakukan demonstrasi anti korupsi. Surat-surat kabar pun gencar memberitakan kasus korupsi di Pertamina awal 1970-an. Namun, seiring dengan 'kokohnya' kekuatan 'Negara Orde Baru', aksi-aksi anti korupsi maupun berita-berita menyangkut KKN menghilang dari 'peredaran'.
3. Krisis, krisis legitimasi politik dan problem penegakan hukum. Jatuhnya Orde Baru yang ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, 21 Mei 1998, disusul diangkatnya BJ Habibie menjadi presiden 'baru', setidaknya, menandai tamatnya era Soeharto. Krisis legitimasi muncul tatkala masyarakat tidak lagi percaya sepenuhnya dengan aspek terjang pemerintah, karena proses-proses legitimasi politik Orde Baru selalu 'bermasalah'. Bila legitimasi tersebut dipersoalkan, biasanya berawal dari pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Pemilu-pemilu masa Orde Baru nyaris semua 'bermasalah' dan inilah biang dari kekeroposan legitimasi politik Orde Baru.
4. Salah satu dampak dari arus utama (mainstream) politik Orde Baru ialah pemusnahan potensi-potensi demokrasi. Sebagaimana

diungkapkan William Liddle, “sekitar 30 tahun lalu, sisa-sisa pemerintahan demokratis di Indonesia dimusnahkan oleh pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soeharto dan para perwira ABRI pendukung Soeharto.” Bagi Liddle proses pemusnahan itu sebenarnya telah dimulai pemerintahan demokrasi terpimpin yang terjadi akhir tahun 1950-an, yang diciptakan oleh presiden Soekarno dan para-pemimpin ABRI. Sehingga praktis, ruang gerak yang bebas dari bagi demokrasi, hanya berjangka tujuh tahun saja: 1949-1956. Sebab, kata Liddle, “pada awal 1957, Soekarno dan para pucuk pimpinan ABRI mulai tampil ke depan untuk menanggulangi pemberontakan yang meletus di beberapa daerah dan ketidakmampuan anggota konstituante menyelesaikan konflik tentang bentuk negara.”

5. Berkaitan dengan argumentasi di atas, ialah ambruknya pilar-pilar demokrasi, mengerucutnya budaya feodalisme dan otoritarian. Kebebasan berpendapat tidak menemukan ruang dan waktunya yang tepat dimasa Orde Baru pres dibatasi ruang geraknya lewat pengendalian SIUPP. Oposisi dimandokan, atau dengan kata lain “dihilangkan” dari kosa kata perpolitikan Orde Baru. Kritik kepada pemerintah harus disalurkan lewat salurannya yang tepat misalnya DPRD. Tapi, realitasnya DPRD tidak sekuat lembaga eksekutif. Saluran-saluran politik, sebagai wahana memperlancar penyampaian aspirasi politik, tampak buntu.

### 5.11 Runtuhnya Sistem Ketatanegaraan pada Masa Orde Baru

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Adapun beberapa penyelewengan yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yang menyebabkan terjadinya beberapa krisis yang melanda negara Indonesia, adalah sebagai berikut:

#### 1. Krisis Politik

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara *de jure* (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara *de facto* (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme)

Gerakan reformasi menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, diantaranya:

##### a. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

- b. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR
- c. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
- d. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
- e. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

Berikut adalah petikan pidato pengunduran diri Soeharto:

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.

Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VI demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof Dr Ing BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.

## 2. Krisis Moneter

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih

sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Pada masa Orde Baru, perekonomian lebih memberikan keuntungan bagi kaum modal atau konglomerat. Hal tersebut adalah wujud dari praktik-praktik KKN yang mengakibatkan rakyat semakin miskin dan tidak berdaya. Berikut adalah krisis ekonomi:

- a. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah pada tanggal 1 Agustus 1997.
- b. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997.
- c. Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank bermasalah.
- d. Kepercayaan Internasional terhadap Indonesia menurun.
- e. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo.
- f. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatan sama sekali.
- g. Persediaan barang nasional, khususnya sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997.

Untuk mengatasi kesulitan moneter tersebut, pemerintah meminta bantuan dana pembangunan dari institusi nasional, yaitu

International Monetary Fund (IMF). Pada tanggal 15 Januari 1998 di jalan Cendana Jakarta, Presiden Soeharto menandatangani 50 butir Letter Of Intent (LoI) yang disaksikan oleh Direktur IMF Asia, Michel Camdessus, sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar negeri tersebut. Faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik.

a. Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 mencapai 63,462 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dolar Amerika Serikat. Ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam, bahkan sempat mencapai Rp 16.000,00. akibat dari utang-utang tersebut, maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Para pedagang luar negeri tidak percaya lagi terhadap importir Indonesia yang dianggap tidak akan mampu membayar barang dagangan. Hampir semua negara luar tidak mau menerima Letter Of Credit (L/C) dari Indonesia.

b. Penyimpangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang perorang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasarkan asas demokrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang. Oleh karena itu, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak maka akan jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan akan merugikan rakyat.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 (utang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan pasal 33 Undang-Undang Dasar



1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam.

Penyimpangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Adapun bentuk-bentuk penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru meliputi, antara lain:

- 1) Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
- 2) Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (presiden).
- 3) Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih kembali.
- 4) Terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
- 5) Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

- 6) Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
- 7) Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas.
- 8) Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnyanya, sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.
- 9) Monopoli, oligopoli, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

c. Pola Pemerintahan Sentralistik

Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistik, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pelaksanaan politik sentralisasi ini sangat terlihat pada bidang ekonomi, sebagian besar kekayaan daerah dibawa ke pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak karena dominasi pusat terhadap daerah sangat kuat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Krisis moneter dan ekonomi semakin meluas dan menjadi krisis multidimensional. Di tengah situasi yang semakin melemahnya nilai rupiah, aksi

massa, aksi buruh, dan aksi mahasiswa terjadi dimana-mana. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengadakan pemulihan ekonomi, sehingga harga-harga sembako turun, tidak lagi ada PHK dan lain-lain.

### 3. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi dibidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

### 4. Krisis Kepercayaan

Demonstrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat. Soeharto kembali

ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR/MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total dipenuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demonstrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.

Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J.Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara.

## 5. Krisis Sosial

Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak politik yang tinggi baik ditatanan pemerintahan maupun ditingkat pergerakan rakyat dan mahasiswa. Suhu politik yang memanas menimbulkan berbagai potensi perpecahan sosial di masyarakat. Pola transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak diiringi dengan penanganan solidaritas sosial di daerah tujuan. Pada akhirnya kecemburuan sosial akibat adanya disparitas tingkat perekonomian tidak dapat dihindari. Kondisi inilah yang kemudian memicu tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mereformasi pola pembangunan ekonomi. Tuntutan inilah yang kemudian memunculkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya reformasi bagi kehidupan bangsa.

## 6. Pemerintahan Era Reformasi

“Kata reformasi berasal dari kata Inggris *reform* yang artinya perbaikan atau pembaharuan”, (Windi, 2011:1). Hakikatnya, reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (*to change without destroying*) atau perubahan dengan memelihara (*to change while preserving*). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia yang berhasil mendorong perubahan tata pemerintahan di negeri ini. Gerakan reformasi berhasil melakukan perubahan dengan jalan menumbangkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lebih. Reformasi menuntut perubahan di berbagai lini kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hukum termasuk dalam konteks pemerintahan. Perubahan ini sebagai konsekuensi dari harapan akan cita-cita untuk membawa Indonesia keluar dari masalah.

Masa Era Reformasi menurut I Wayan Badrika (2006:166) pada hakikatnya “Reformasi merupakan perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju arah perbaikan”. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terutama dalam perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.

Sementara itu melihat situasi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi sangat kritis dan menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, kebangsaan dan bernegara. Adapun pengertian Reformasi menurut Manggala (2011:1) menyebutkan bahwa:

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama menuju tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang

terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Reformasi adalah suatu masa dimana awal berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru (1998), jadi Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan yang baru, dimana masa untuk mengoreksi dan memperbaiki masa pemerintahan Orde Baru. Reformasi berlangsung di Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan sekarang (pemerintahan SBY). Pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan SBY telah berlangsung selama dua periode, yaitu sejak pemilu 2004 hingga sekarang, yang akan berakhir nanti ditahun 2014.

### **6.1 Latar Belakang Lahirnya Reformasi**

Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya Reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu.

Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan

itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan Reformasi. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi.



## **6.2 Masalah Ideologi pada Era Reformasi**

Pada masa reformasi (setelah rezim Soeharto runtuh), seolah menandai adanya jaman baru bagi perkembangan perpolitikan nasional sebagai anti-tesis dari Orde Baru yang dianggap menindas dengan konfrimitas ideologinya. Pada era ini timbul keinginan untuk membentuk masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan sosial tanpa kooptasi penuh dari negara. Lepas kendalinya masyarakat seolah menjadi fenomena awal dari tragedi besar dan konflik berkepanjangan. Tampaknya era ini mengulang problem perdebatan ideologi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, yang berakhir dengan instabilitas politik dan perekonomian secara mendasar. Berbagai bentuk interpretasi monolitik selama ini cenderung mengaburkan dan menguburkan makna substansial Pancasila dan berakibat pada Pancasila yang menjadi sebuah mitos, selalu dipahami secara politis-ideologis untuk kepentingan kekuasaan serta nilai-nilai dasar Pancasila menjadi nilai yang distopia, bukan sekedar utopia.

## **6.3 Dinamika Politik pada Era Reformasi**

Dinamika politik pada Era Reformasi, dapat dilihat berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, dikeluarkannya UU No. 2/1999 tentang

parpol yang memungkinkan multipartai, UU No. 12/1999 tentang pegawai negeri yang menjadi anggota parpol dan sebagainya.

2. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab yang dibuktikan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998. Ketetapan MPR ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
3. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya terhadap eksekutif yang cenderung seimbang dan proporsional.
4. Lembaga tinggi negara MPR telah berani mengambil langkah-langkah politik melalui pelaksanaan sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan kemajuan kerja (progress report) semua lembaga tinggi negara, amandemen terhadap undang-undang, pemisahan jabatan antara ketua DPR dan MPR dan sebagainya.
5. Media massa diberikan kebebasan dalam menentukan tugas jurnalistiknya secara profesional tanpa ada rasa ketakutan untuk dicabut surat izin penerbitannya. Bahkan insan wartawan diberikan kebebasan pula untuk membentuk organisasi profesi sesuai dengan aspirasi dan tujuannya.

6. Sesuatu yang membanggakan kita dalam reformasi politik adalah adanya pembatasan kekuasaan presiden, dan untuk pemilu 2004 presiden dan wakil presiden tidak dipilih lagi oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga untuk anggota legislatif, mereka telah diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas. Selain itu, dibentuk pula DPD untuk mengakomodasi aspirasi daerah.
7. Dalam perjalanan Era Reformasi yang telah mencapai 5 tahun, arah visi dan misi serta agenda-agenda Reformasi yang telah dicanangkan belum terpenuhi. Masih banyak tatanan politik, ekonomi dan hukum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat luas. Namun demikian, energi reformasi dan kontrol masyarakat yang mengiringi berbagai perubahan sosial diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis.

#### **6.4 Dinamika Perekonomian pada Era Reformasi**

Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Terlihat dari nilai rupiah yang masih bertahan dikisaran Rp 8.000-9.000 per dollar AS. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin meluas, karena segala usaha sudah tidak cukup menguntungkan sehingga terpaksa dilakukan perampangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Investasi dari dalam maupun dari luar negeri tidak berjalan seperti sebelumnya.

Bahkan, banyak investor asing yang lari keluar negeri dan mencoba peruntungannya di negeri lain dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan di Indonesia. Indonesia bukan lagi tempat investasi yang menarik bagi para investor luar negeri. Sebagai akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk dari sejak krisis tahun 1997.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat lima sektor kebijakan yang harus digarap yaitu:

- a. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin.
- b. Penyediaan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.
- c. Penyediaan fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, angkutan dengan harga yang terjangkau.
- d. Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau.
- e. Penyediaan klinik, dokter dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.

### **6.5 Dinamika Kehidupan Sosial pada Era Reformasi**

Sejak krisis moneter melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan, pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban untuk membayar gaji atau upah para pekerjanya. Sementara itu, harga-

harga kebutuhan bahan pokok melambung tinggi. Hal ini berakibat langsung pada para pekerja. Akhirnya para pekerja menuntut kenaikan gaji atau upah kepada para perusahaan.

Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat, karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadiah PHK dengan alasan perusahaan tidak mungkin dapat menggaji seluruh pekerjanya sehingga diadakan perampingan karyawan.

Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga angka pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Jumlah pengangguran yang cukup besar ini hendaknya mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah. Sebab, pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah semakin maraknya tindakan-tindakan kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Alasan yang sering muncul yakni pernyataan-pernyataan seperti masalah ekonomi rumah tangga yang dihadapinya sehingga mereka melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, pencopetan, pencurian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pemerintah dengan serius berusaha menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Walaupun tidak semua berhasil tertampung, tetapi setidaknya secara bertahap telah mengurangi pengangguran. Langkah berikutnya, pemerintah menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka dan menambah lapangan kerja untuk menampung para pengangguran.

#### **6.6 Dinamika Hankam pada Era Reformasi**

Selama kurang lebih tujuh tahun terakhir Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (Security Sector Reform-SSR) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999. karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Semua itu dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) . Jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil, sesuatu yang sulit diterapkan saat Orde Baru berkuasa. Di samping itu juga, pengangkatan Panglima

TNI dari unsur TNI Angkatan Laut telah mematahkan mitos jabatan Panglima TNI biasanya berasal dari unsur TNI AD, dengan menempatkan Laksamana Widodo AS sebagai Panglima TNI. Wahid juga mengeluarkan kebijakan yang tak kalah pentingnya dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 yang menghapus Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakortanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus), seperti kita ketahui, kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang mematikan ruang gerak politik publik pada masa Orde Baru.

Membicarakan tentang HAM dan keamanan, merupakan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan SBY-Boediono. IMPARSIAL the Indonesian Human Rights Monitor (2011:1) menyatakan bahwa:

“Pencapaian selama dua tahun masa pemerintahan SBY-Boediono dalam upaya merealisasikan perbaikan di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Reformasi Sektor Keamanan (RSK) masih belum menunjukkan adanya kemajuan. Bahkan, dapat dikatakan terlihat tidak ada prestasi yang berarti. Banyaknya agenda yang hingga kini macet, terbengkalai atau tidak dijalankan, memperlihatkan rendahnya komitmen dan perhatian pemerintah saat ini untuk memajukan HAM dan reformasi sektor keamanan”.

Kegagalan pemerintah terhampar dalam banyak sektor. Mulai dari kegagalan perbaikan dan penataan regulasi yang dimandatkan, regulasi yang telah dibuat juga tidak berjalan implementasinya, hingga macetnya penegakan HAM. Penting dicatat bahwa upaya perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan merupakan bagian dari mandat reformasi yang harus dijalankan sejalan dengan proses demokratisasi Indonesia. Agenda itu harus diwujudkan secara berlanjut

dalam upaya mewujudkan negara Indonesia yang demokratis dan menjamin serta melindungi hak asasi manusia. Secara prinsip, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi merupakan amanat konstitusi. Sementara reformasi sektor keamanan adalah wujud dari komitmen sebagai negara demokrasi, yang karena itu, telah menjadi keharusan bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk merealisasikannya.

IMPARSIAL the Indonesian Human Rights Monitor (2011:1) mengatakan bahwa “hingga saat ini banyak agenda di bidang HAM dan RSK yang belum dijalankan meski pemerintahan SBY pada periode kedua kekuasaannya. Berbagai agenda yang terbengkalai itu merentang mulai dari kebijakan hingga implementasi”. Dalam konteks kebijakan di bidang HAM, beberapa agenda yang terbengkalai tercatat berkaitan dengan upaya pembentukan baru ataupun perbaikan regulasi yang telah ada. Di antaranya pembentukan UU KKR atau UU tentang perlindungan Pembela HAM yang belum diwujudkan. Sementara itu, upaya memperbaiki Undang-undang HAM, revisi KUHP dan UU tentang Polri juga masih belum terealisasi, dan lain-lain. Hingga kini, upaya penghapusan hukuman mati dalam peraturan nasional juga belum dilakukan, kendati secara jelas bertentangan dengan Konstitusi yang menjamin hak hidup.

Berkaitan dengan reformasi sektor keamanan, sejumlah agenda perbaikan di sektor ini yang sudah dimandatkan juga tercatat belum dijalankan. Misalnya adalah reformasi peradilan militer yang hingga



kini masih menjadi sarang impunitas kasus pelanggaran HAM yang melibatkan TNI, implementasi pengambilalihan seluruh bisnis TNI yang belum tuntas, pembentukan UU tugas perbantuan. Selain itu, agenda lain yang penting dan belum berjalan adalah restrukturisasi komando teritorial.

Sementara itu, alih-alih merealisasikan berbagai agenda di atas yang sesuai dengan amanat reformasi, pemerintahan SBY-Boediono ini justru melahirkan regulasi yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat. Hal itu terlihat dengan disahkannya undang-undang intelijen, yang substansi pengaturannya banyak yang bermasalah dan mengancam kebebasan, serta mengancam *criminal justice system*. Disahkannya UU Intelijen ini sekali lagi memperlihatkan rendahnya komitmen pemerintah mendorong reformasi sektor keamanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Selain soal regulasi, persoalan penegakan HAM selama pemerintahan SBY-Boediono juga tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bukan hanya berkaitan dengan penuntasan kasus-kasus masa lalu yang hingga kini tidak jelas, namun kini muncul juga sejumlah kasus baru yang memperlihatkan rendahnya jaminan dan perlindungan atas hak asasi pada masa pemerintahan saat ini, yang kasus-kasusnya merentang mulai dari pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga hak-hak sipil dan politik.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir hingga kini tidak jelas. Meski di awal periode kekuasaannya yang pertama SBY pernah menyatakan pengungkapan kasus munir sebagai “*test of our history*”, akan tetapi dalam kenyataannya hingga kini tidak ada keseriusan untuk mengungkap kasus tersebut secara tuntas. Pelaku yang diduga menjadi aktor intelektual di balik pembunuhan Munir masih melenggang bebas dan bebas dari hukuman. Ketidakjelasan pengungkapan kasus ini kian menambah deret kegagalan pemerintahan SBY dalam mengungkap tuntas pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus pelanggaran HAM Talangsari, Priok, Mei 1998, dan lain-lain.

Sementara itu, ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM juga masih terjadi di sejumlah tempat. Terlebih lagi di daerah konflik seperti Papua. Kalangan jurnalis juga masih sering mengalami kekerasan. Pembela HAM masih dipandang oleh kekuasaan sebagai ancaman dan karena itu, sering menjadi target kekerasan dan ancaman.

Jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan selama ini tetap menunjukkan raport merah. Kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih terjadi di sejumlah tempat. Kasus Temanggung, penyerangan di Cikeusik, dan terakhir kasus GKI Yasmin di Bogor adalah beberapa kasus yang memperlihatkan rendahnya komitmen dan keseriusan pemerintahan SBY dalam upaya menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga. Padahal jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan

ini merupakan perintah Konstitusi. Pembiaran oleh aparat dalam kasus kekerasan kelompok keagamaan menjadi masalah serius selama ini.

Lebih lanjut, jaminan dan perlindungan terhadap hak hidup (*right to life*) warga negara juga masih bermasalah. Tidak hanya di dalam negeri, akan tetapi juga di luar negeri. Di dalam negeri, hal itu dapat dilihat dengan masih diterapkannya praktek hukuman mati. Praktek hukuman ini bukan hanya melanggar hak hidup, namun terbukti gagal untuk memberikan efek penjeraan. Sementara itu, pemerintahan juga gagal melindungi buruh migrant di luar negeri, khususnya dari ancaman hukuman dan eksekusi mati. Saat ini tidak sedikit buruh migrant asal Indonesia menghadapi eksekusi mati di negara lain.

Presiden pada peringatan 17 Agustus 2011 menyatakan akan membangun Papua dengan hati. Janji Presiden ini masih ditunggu hingga kini, terlebih setelah Presiden mengesahkan 2 perpres mengenai percepatan pembangunan Papua dan pembentukan Unit untuk menjalankan percepatan pembangunan di Papua. Akan tetapi hingga saat ini masih belum ada realisasi yang signifikan terkait upaya perlindungan HAM di Papua.

Alih-alih membenahi kelemahan kinerja menteri-menterinya, dalam *reshuffle* kabinet yang dilakukan semalam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengulangi lagi kesalahannya. Presiden masih tersandera kompromi politik dengan mempertahankan menteri-menteri bermasalah yang notabene adalah pimpinan partai-partai politik yang

menjadi rekan koalisi. Presiden juga memaksakan diri menciptakan kementerian baru yang diragukan efektivitasnya, serta tidak mengutamakan profesionalitas dalam pelayanan kepada rakyat. Pada pokoknya, *reshuffle* yang dilakukan kali ini bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, sehingga rakyat akan semakin dikorbankan.

IMPARSIAL the Indonesian Human Rights Monitor (2011:1) mengatakan bahwa “masih banyaknya agenda perbaikan HAM dan reformasi sektor keamanan yang terbengkalai dan mandeg di tengah jalan ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan jalannya masa pemerintahan SBY-Boediono pada kedua bidang tersebut”. Karena itu, kegagalan itu sudah seharusnya menjadi koreksi dan harus dievaluasi untuk perbaikan. Pelaksanaan berbagai agenda yang terbengkalai itu dapat menjadi ukuran sejauhmana pemerintahan saat ini memiliki komitmen terhadap HAM dan reformasi sektor keamanan. Terkait evaluasi terhadap jalannya masa pemerintahan SBY-Boediono dalam bidang HAM dan reformasi sektor keamanan ini, maka IMPARSIAL the Indonesian Human Rights Monitor (2011:1) menuntut:

1. Komitmen dan keseriusan pemerintahan SBY-Boediono dalam upaya merealisasikan berbagai agenda pembentukan dan perbaikan kerangka regulasi nasional baik itu di bidang HAM ataupun RSK yang masih banyak terbengkalai;
2. Keseriusan pemerintahan SBY-Boediono dalam upaya mengusut tuntas berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya terkait pembunuhan aktivis HAM Munir sebagaimana yang dijanjikan di awal periode kekuasaannya yang pertama;
3. Implementasi yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintahan saat ini terhadap berbagai jaminan normatif

HAM yang telah dibentuk, serta merealisasikan agenda reformasi sektor keamanan yang telah dimandatkan.

### **6.7 Masalah Agama pada Era Reformasi**

Seusai Orde Baru, pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa mulai mendapatkan kembali pengakuan atas identitas mereka sejak UU No 1/Pn.Ps/1965 yang menyatakan bahwa agama-agama yang banyak pemeluknya di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

### **6.8 Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Demikian pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.

Dengan adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652 suara atau 39,09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Partai Demokrat - Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60,91%.

Susilo Bambang Yudhoyono diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004,

untuk periode kepresidenan 2004-2009. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya:

- a. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
- b. Konversi minyak tanah ke gas.
- c. Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
- d. Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.
- e. Buy back saham BUMN
- f. Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
- g. Subsidi BBM.
- h. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
- i. Meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
- j. Pemberian bibit unggul pada petani.
- k. Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Masalah yang ada:

1. Masalah pembangunan ekonomi yang alah kadarnya sangat memperhatikan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.

2. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi tidak terhindarkan. Satu- satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah Badan SAR Nasional yang saat ini pun terlihat kedodoran karena sumber daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dan lain-lain hanya menjadi pemborosan yang luar biasa.
3. Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.
4. Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi justru mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
5. Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit

pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya pernyataan Jusuf Kalla yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai terasa menghambat pembangunan.

6. Masalah politik luar negeri. Indonesia terjebak dalam politik luar negeri 'Pahlawan Kesiangan'. Dalam kasus Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.

Dampak Reformasi bagi rakyat Indonesia:

1. Pemerintahan Orde Baru jatuh dan muncul Era Reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antara kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama.
2. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan



jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.

3. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan.
4. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah).
5. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

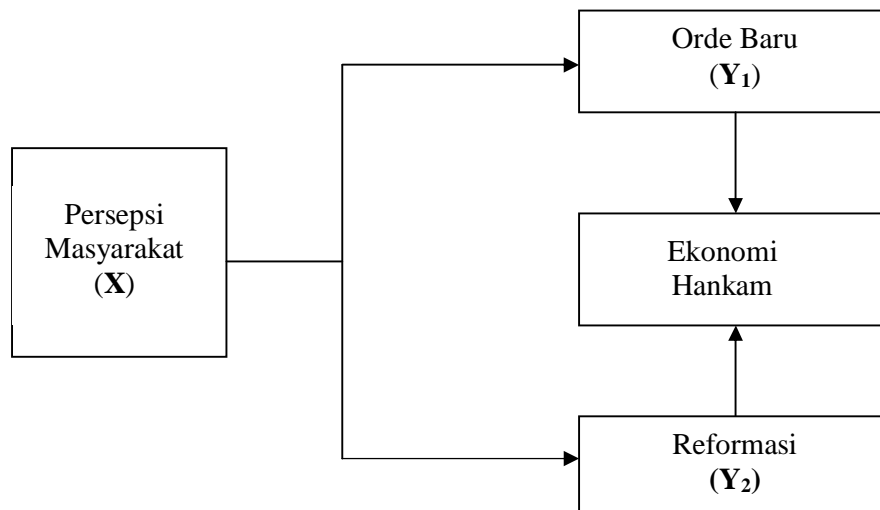
## **B. Kerangka Pikir**

Masyarakat pasti memiliki banyak persepsi mengenai pemerintahan era Soeharto dan SBY. Cenderung banyak orang, khususnya rakyat kecil pada umumnya lebih memilih kehidupan di Era Orde Baru, namun ada sebagian kecil orang beranggapan yang sebaliknya. Tentu orang yang berpikiran sebaliknya tersebut lebih memilih Era Reformasi, hal itu tentu dikarenakan orang tersebut sedikit tahu tentang permainan politiknya Soeharto yang meninabobokan rakyat kecil dengan memprioritaskan kemajuan dibidang perekonomian dan dibidang keamanan.

Bagi orang kecil, umumnya petani di pedesaan menganggap politiknya Soeharto sangat bagus. Semua kebijakan sesuai dengan ideologi bangsa yaitu

demokrasi Pancasila, dan kehidupan semakin dirasa lebih baik, pembangunan nasional dibidang ekonomi dan keamanan dianggap cukup memuaskan. Tapi mereka kurang peka terhadap situasi politik yang sebenarnya dimainkan oleh Soeharto. Oleh sebab itu sebagian orang, biasanya PNS yang memiliki pengetahuan yang luas tahu akan permainan politik Soeharto. Dari kelemahan Undang-Undang Dasar 1945, Soeharto memanipulasi pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan memulai politik Orde baru, sehingga sebagian orang tersebut lebih memilih kehidupan di Era Reformasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi dan hankam antara pemerintahan Orde Baru dengan Reformasi khususnya di bawah pemerintahan SBY. Jadi dapat disajikan dalam bentuk skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Diagram kerangka pikir